

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta stabilitas nasional. Menurut Widjaja (2010 : 3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman , partisipasi, otonomi asli, demokratisasi , dan pemberdayaan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menganut asas desentralisasi di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Definisi Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema (dalam S.H. Sarundajang, 2002) dipandang sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Desentralisasi ini menjadi dasar dalam memberikan pintu yang selebar-lebarnya bagi daerah untuk berinovasi dan menggali potensi yang dimiliki.

Di era globalisasi , kemandirian dan daya saing daerah menjadi kunci kesuksesan pemerintah daerah. Daerah yang dapat bersaing dan mandiri tentu akan dapat menghadapi arus globalisasi dan pengaruh dari luar. Hal terpenting dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah dilakukan melalui inovasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Maka dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, yang mengatur mengenai kewenangan urusan desa ditambah dengan adanya alokasi dana desa dapat membuka peluang bagi setiap desa di Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Peran desa sangatlah penting mengingat desa menjadi tumpuan bagi pembangunan nasional dan keberhasilan desa akan menjadi dorongan bagi keberhasilan ekonomi sosial. Desa perlu dikembangkan menuju desa cerdas, salah satu langkah inovatif dalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan penerapan konsep *green smart village*. Konsep *green smart village* mengadopsi dari beberapa komponen konsep *smart city*, akan tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam penerapan *green smart village* tidak semata-mata melihat kepada kecanggihan ICT (*Information, Communication, and Technology*), akan tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana konsep *green smart village* dapat mengubah masyarakat dan pemerintah desa agar dapat berinteraksi dalam menciptakan kesadaran untuk tujuan pembangunan desa.

Dewasa ini telah banyak desa- desa di Indonesia yang menerapkan konsep *smart village* yang menggunakan berbagai sebutan lain dengan fokus peningkatan yang berbeda, baik dari segi pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi. Meskipun konsep *smart village* mengacu pada dimensi *smart city*, akan tetapi konsep tersebut tidak bisa serta merta dimodelkan untuk desa. Perlu adanya usaha yang lebih dalam pembangunan desa karena adanya alasan kondisi lokal desa, ketersediaan infrastruktur, serta sumberdaya yang ada. Salah satu daerah yang telah sukses menerapkan konsep *smart village* adalah desa-desa di Kabupaten Banyuwangi dengan sebutan “*Smart Kampung*” yang berfokus

pada peningkatan pelayanan publik. Di Desa Banyuanyar sendiri salah satu tujuan diterapkannya konsep *green smart village* adalah bentuk upaya dalam meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

Terdapat sedikitnya dua latar belakang yang menjadi pokok mengapa penelitian mengenai “ Implementasi *Green Smart Village* di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa “ penting untuk dilakukan yakni latar belakang empirik dan latar belakang teoritik. Latar belakang empirik didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan berikut ini :

Desa Banyuanyar , Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali merintis desa berbasis teknologi informasi yang pertama di Boyolali. Desa Banyuanyar mengawali penerapan program *green smart village* dengan tujuan membangun masyarakat yang paham teknologi. Tidak hanya demi meningkatkan kualitas SDM saja, akan tetapi dengan adanya *green smart village* diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah desa dengan berbasis IT. Program ini juga mendukung program *smart city* yang dicanangkan oleh Kabupaten Boyolali. *Smart city* Boyolali merupakan penjabaran visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021. Visi Boyolali “**Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera**” dan misi Boyolali “**Boyolali berdaya saing, maju, dan berteknologi**” ini memberi semangat untuk membangun Boyolali yang maju dan unggul (memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibanding daerah lain) serta mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa Banyuanyar mengerti akan pentingnya dunia digital, salah satunya internet di era modernisasi ini. Hal ini sesuai dengan visi kepala desa Banyuanyar yaitu **“Desa Banyuanyar Mewujudkan Sebagai Kawasan Desa Hijau dan Pintar (Green Smart Village ) Menuju Desa Mandiri, Religius, Berbudaya Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila”**. Terwujudnya pembangunan sarana teknologi informasi perdesaan sebagai Desa Cerdas *“Smart Village”* dengan basis internet agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses segala macam informasi baik dalam skala lokal maupun global. Pemerintah Desa Banyuanyar juga memberikan fasilitas program internet *Wireless Fidelity* atau Wifi untuk memfasilitasi masyarakat desa agar dapat memanfaatkan internet gratis, menelpon gratis bebas pulsa. Hingga tahun 2019 pemerintah desa Banyuanyar telah melakukan pemasangan *wifi hotspot* sebagai akses internet gratis di 21 titik desa Banyuanyar. Selain itu sebagai bentuk edukasi masyarakat pemerintah desa Banyuanyar telah membuat *website* desa yang dilengkapi dengan *Information and Communication Technology Center (ICT Center)* di Desa Banyuanyar.

Pembangunan dibidang infrastruktur teknologi seperti pengadaan wifi di sejumlah titik di desa Banyuanyar dilakukan sebagai bentuk dalam memenuhi pilar-pilar *smart village* yang telah di programkan. Penyediaan jaringan *wifi* gratis yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat membuat masyarakat memanfaatkan fasilitas untuk menunjang produktivitas dan mobilitas yang tinggi, selain itu wifi ini dapat digunakan untuk berhubungan dengan pemerintahan baik antar desa, antar kecamatan , maupun dengan pemerintahan kabupaten Boyolali baik untuk pelaporan hal –hal tertentu ataupun pengaksesan informasi-informasi pemerintahan. Disamping itu hal –hal yang unik dari

penerapan *green smart village* ini selain menjadi satu – satunya desa yang menerapkan konsep *green smart village* di Kabupaten Boyolali, program ini juga telah mampu menggerakkan potensi lokal desa seperti dibidang peternakan dan perkebunan dimana banyak dari masyarakat setempat berprofesi sebagai peternak dan petani. Peternak dan petani tersebut mampu berinovasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu dengan adanya pengolahan bidang peternakan dan pertanian terpadu menjadikan Desa Banyuanyar memiliki produk unggulan yang sekaligus mendukung program Kementrian Desa yaitu *one village one product*.

Sedangkan untuk latar belakang teoritik di dalam kajian ilmu pemerintahan, dapat dilihat bahwa implementasi dari suatu program maupun kebijakan sangat penting untuk diteliti, hal ini karena ada banyak variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Menurut Subarsono (2010 : 89) kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat , tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Arti penting dari implementasi kebijakan atau suatu program dikemukakan oleh Udoji ( dalam Agustino , 2014 : 140 ) yaitu :

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi menjadi tahapan paling penting didalam struktur kebijakan. Tahapan ini akan menentukan apakah pemerintah benar-benar dapat menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai yang telah direncanakan. Sejalan dengan pendapat Winarno (2002 : 101) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya menurut Winarno ( 2002 : 163) proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor , baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Namun dibalik kerumitan dan kompleksitas tersebut , implementasi cukup memegang peran yang vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program –program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.

Penelitian yang mengkaji permasalahan *smart village* di Indonesia telah banyak dilakukan terutama mengenai program “*smart kampung*” di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tidak banyak yang memfokuskan pada implementasinya. Penulis menemukan data hasil penelitian mengenai program *smart village* sebagai berikut;

*Pertama*, dari skripsi yang ditulis oleh Ariska ayu Citra yang berjudul “*Analisis Program Smart Kampung di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik* “. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik dengan fokus penelitian proses pelayanan publik melalui program *Smart Kampung*. Dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Program pelayanan *Smart Kampung* membuat pelayanan menjadi lebih cepat. Hal ini didukung oleh kepemimpinan baik dan sumberdaya baik. Sementara faktor yang menghambat program smart kampung adalah kurang efektifnya evaluasi dari SKPD.

*Kedua*, dari skripsi yang ditulis oleh Panca Oktawirani yang berjudul “*Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi*”. Penelitian ini menggunakan teori *e Government* dengan fokus penelitian yaitu kondisi aktual dan model akselerasi penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa melalui program smart kampung. Dimana hasil dari penelitian ini adalah Program *Smart Kampung* mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui *Smart Kampung* dan berbagai fitur yang terdapat di program *Smart Kampung* mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa menjadi lebih baik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pelayanan dilakukan dengan konsep satu atap yaitu pelayanan dipusatkan pada pemerintahan di desa, bukan lagi di kabupaten atau kecamatan sehingga lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

*Ketiga*, dari skripsi yang ditulis Siti Maryam dengan judul “*Implementasi Perbup No.18 tentang Integrasi pelayanan Smart Kampung (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi* “. Penelitian ini menggunakan teori

implementasi kebijakan publik dan pelayanan publik dengan fokus penelitian yang digunakan yaitu implementasi perbup No. 18 tentang integrasi program *Smart* Kampung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Pelayanan *Smart* Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan. Pemerintah Desa Kampung Anyar dan masyarakat Kampung Anyar sangat antusias dalam mewujudkan implementasi program *Smart* kampung. Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu waktu penyelesaian, ekonomis, kesederhanaan, keterbukaan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan program smart kampung. Faktor penghambat implementasi kebijakan smart kampung yaitu: sarana prasarana yang kurang baik seperti jaringan fiber optik yang sering terjadi gangguan, tempat duduk atau ruang tunggu yang kurang memadai dan belum disediakan kotak saran. Adanya sebagian kecil masyarakat yang kurang percaya terhadap pihak pemerintah desa dan adanya masyarakat yang apatis terhadap urusan administrasi sehingga berdampak implementasi tidak merata.

*Keempat*, dari skripsi yang ditulis oleh Siti Komsatun yang berjudul “ *Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi* “. Penelitian ini menggunakan teori inovasi, dimana hasil dari penelitian ini adalah adanya inovasi pelayanan yang berbasis internet memotong rentang pelayanan yang jauh , kini dapat dirasakan oleh masyarakat hingga di tingkat desa. Pelayanan publik yang



sebelumnya bersifat konvensional berubah menjadi berbasis internet. Program smart kampung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah desa.

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian pada implementasi *green smart village* di dalam meningkatkan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini unik, dikarenakan penerapan program *green smart village* masih sedikit dilakukan oleh pemerintah desa di Indonesia, bahkan di Kabupaten Boyolali *green smart village* baru pertama kali diterapkan oleh pemerintah Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel. Hal ini yang membuat pemerintah Desa Banyuanyar menjadi percontohan oleh desa-desa lainnya.
2. Peneliti terdorong oleh rasa ingin tahu mengenai pelaksanaan pembangunan desa dengan menerapkan konsep *green smart village* yang menjadi upaya untuk meningkatkan pembangunan desa tersebut.
3. Di dalam penelitian terdahulu mengenai *green smart village*, cenderung banyak mengambil fokus penelitian dari sudut pandang teori inovasi dan pelayanan publik. Padahal seperti yang telah dijelaskan bahwa tahap implementasi adalah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Ditambah lagi pada penelitian ini pembanguna desa dengan konsep *Green Smart Village* di Desa Banyuanyar masih mengalami berbagai kendala dan masalah sehingga pembangunan desa dinilai belum maksimal. Sehingga sangat tepat bila penelitian ini menggunakan teori implementasi.

Dari ketiga alasan tersebut maka mengambil judul terkait pembahasan skripsi ini yakni **“IMPLEMENTASI *GREEN SMART VILLAGE* DI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (DESA BANYUANYAR KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa melalui konsep *green smart village* dan peran aktor di dalamnya?
- 2) Bagaimana implementasi *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuanyar sesuai dengan teori George Edwards III?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *green smart village* di Desa Banyuanyar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuam penelitian ini adalah :

- 1) Mendiskripsikan pembangunan desa melalui konsep *Green Smart Village* di Desa Banyuanyar.
- 2) Menjelaskan peran aktor di dalam implementasi *green smart village* Desa Banyuanyar
- 3) Menjelaskan implementasi *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan indikator – indikator teori implementasi George Edwards III.

- 4) Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi *green smart village* di Desa Banyuanyar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritik dan manfaat praktis.

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Adapun manfaat penelitian teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1) Memperkaya khasanah ilmu politik dan pemerintahan, sehingga dapat digunakan untuk sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan implementasi *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.
- 2) Mendukung penerapan program *green smart village* sebagai jawaban dari upaya pembangunan desa di era modernisasi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, *green smart village* dan pembangunan desa.

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis, memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai implementasi *green smart village* di dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui data dan informasi yang ditemukan secara empirik dengan terjun langsung ke lokasi penelitian.
- 2) Bagi pemerintah , penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah atau instansi terkait dengan penerapan *green smart village*. Hal ini karena penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi , peran aktor yang terlibat dan faktor pendukung serta faktor penghambat dari penerapan *green smart village* dalam upaya pembangunan desa. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi pemerintah desa khususnya yang akan atau sedang melaksanakan program *green smart village*.
- 3) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan , melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan *green smart village* yang sekarang ini banyak dilakukan oleh pemerintahan desa di Indonesia sebagai jawaban dari upaya pembangunan desa.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang dua hal. *Pertama*, teori implementasi menurut George Edwards III yang menjadi teori dasar penulis dalam mengetahui sejauhmana pelaksanaan *green smart village* dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuwangi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali serta menjadi pisau analisis

untuk menganalisis implementasi program tersebut. *Kedua*, menjelaskan tentang alur pikir penulis terhadap penulisan skripsi ini.

## **1.5.1 Deskripsi Teori**

### **1.5.1.1 Teori Implementasi**

#### **1) Konsep Implementasi**

Suatu program kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasinya. Tahap implementasi menjadi sesuatu hal yang penting karena pada tahap ini program kebijakan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengertian implementasi menurut James P. Lester (dalam Winarno, 2002 : 101 - 102) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Pemahaman mengenai implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Akib, 2010 : 2) merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15)

bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas sebenarnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran, kemudian di lakukan oleh beberapa aktor sehingga didapatkan hasil, apakah hasil tersebut sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Menurut pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2010 : 90 - 92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yakni :

### **1) Komunikasi**

Menurut Subarsono (2010 : 90) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Menurut Winarno ( 2002 : 126 – 129 ) secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a) Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan

suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan - keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

- b) Konsistensi, faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi yang lain, perintah – perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan – tujuan kebijakan.
- c) Kejelasan, jika kebijakan – kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk – petunjuk pelaksana tidak hanya harus

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

## **2) Sumber daya**

Menurut Subarsono (2010 : 91) walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Menurut Winarno (2002 : 132) sumber – sumber faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik meliputi : staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas – tugas mereka, wewenang, dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan.

## **3) Disposisi**

Menurut Subarsono (2010 :91 – 92) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia



ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

#### 4) Struktur birokrasi

Menurut Subarsono (2010 : 92) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Winarno, 2002 : 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur - prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite - komite legislatif, kelompok - kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

### 1.5.1.2 Konsep *Green Smart Village*

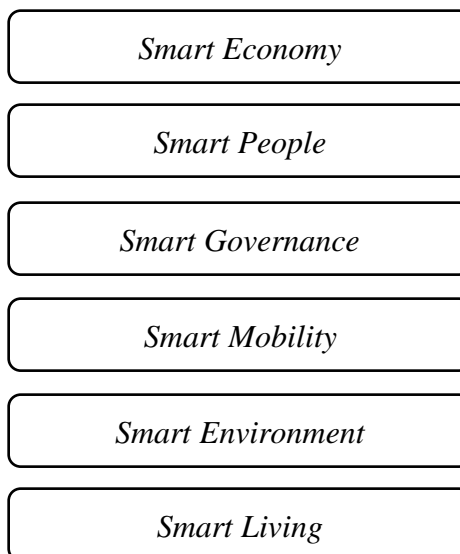
#### 1. Adaptasi Konsep *Smart Village* dari Konsep *Smart City*

Salah satu langkah inovatif yang dapat dilakukan oleh desa dalam mencapai pembangunan desa, salah satunya dengan menerapkan konsep *smart village*. Jika konsep *smart village* mangadaptasi dari konsep smart city maka kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari *smart city*. Profesor Suhono , Guru Besar ITB menjelaskan pengertian *smart city* yaitu :

Smart city sebagai kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunkan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut semata- mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dari definisi tersebut, ciri solusi dalam *smart city* yaitu berupa pemikiran-pemikiran baru, terintegrasi antar lembaga pemerintah hingga lembaga non pemerintah, responsive terhadap persoalan kota serta solusi yang dirancang untuk menjadi solusi yang berkelanjutan , bukan hanya solusi sesaat. (Pahlevi, 2017)

Selanjutnya Giffinger dalam jurnalnya yang berjudul “*Smart cities Ranking of European medium-sized cities*” (2007) menyebutkan terdapat enam konsep dasar dalam penerapan *smart city* yaitu *smart economy (competitiveness)*, *smart people (social and human capital)*, *smart governance (participation)*, *smart mobility (transportation and ICT)*, *smart environment (natural resources)*, *smart living (quality of live)*.

**Gambar 1-1**  
**Indikator *Smart City* Menurut Griffinger**



Sumber : Giffinger, 2007

**Tabel 1-1**  
**Indikator dan Karakteristik *Smart City* Menurut Giffinger**

<b><i>Smart Economy</i></b>	<b><i>Smart People</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Innovative spirit</i></li> <li>b. <i>Entrepreneurship</i></li> <li>c. <i>Economic image dan trademarks</i></li> <li>d. <i>Productivity</i></li> <li>e. <i>Flexibility of labour market</i></li> <li>f. <i>International embeddedness</i></li> <li>g. <i>Ability to transform</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Level of qualification</i></li> <li>b. <i>Affinity to life long learning</i></li> <li>c. <i>Social and ethnic plurality</i></li> <li>d. <i>Flexibility</i></li> <li>e. <i>Creativity</i></li> <li>f. <i>Cosmopolitanism / openmindedness</i></li> <li>g. <i>Participation in public life</i></li> </ul>
<b><i>Smart Governance</i></b>	<b><i>Smart Mobility</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Participation in decision-making</i></li> <li>b. <i>Public and social services</i></li> <li>c. <i>Transparent governance</i></li> <li>d. <i>Political strategies and perspectives</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Local accesbility</i></li> <li>b. <i>(Inter-)national accesbility</i></li> <li>c. <i>Availability of ICT- infrastructure</i></li> <li>d. <i>Sustainable, innovative and safe transport systems</i></li> </ul>
<b><i>Smart Environment</i></b>	<b><i>Smart Living</i></b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Attractive of natural conditions</i></li> <li>b. <i>Pollution</i></li> <li>c. <i>Environmental protection</i></li> <li>d. <i>Sustainable resource management</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Cultural facilities</i></li> <li>b. <i>Health conditions</i></li> <li>c. <i>Individual safety</i></li> <li>d. <i>Housing quality</i></li> <li>e. <i>Education facilities</i></li> <li>f. <i>Tourist attractivity</i></li> <li>g. <i>Social cohesion</i></li> </ul>
--	---

Sumber : Giffinger , 2007

### 1) *Smart Economy*

Indikator *smart economy* memiliki arah pembangunan pada sumber daya manusia dan IPTEK. Fokusnya pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat dalam persaingan nasional maupun global; pengendalian laju jumlah penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.

### 2) *Smart People*

Di dalam sebuah pembangunan maka dibutuhkan suatu modal, baik modal ekonomi, modal sosial, dan modal sosial. Kemudahan akses dalam mendapatkan modal tersebut serta pelatihan –pelatihan baik untuk UMKM dapat meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam mengembangkan usaha.

### 3) *Smart Governance*

Kunci utama dari *smart governance* adalah penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip *good governance* berarti sistem penyelenggaraan pemerintah yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, demokrasi , keadilan, partisipasi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

### 4) *Smart Mobility*

Pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan perumahan dan pemukiman, pengembangan aliran sungai, serta peningkatan pengendalian pembangunan infrastruktur. Ketersedian sarana / prasarana transportasi dan infrastruktur tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kedatangan investor.

**5) *Smart Environment***

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta berdampak pada menurunnya kualitas dan mutu lingkungan. Maka hal yang perlu digalakkan adalah mengatasi kerusakan lingkungan dengan prinsip keberlanjutan.

**6) *Smart Living***

Indikator *smart living* artinya berbudaya, yang berarti manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Dimana kualitas hidup sendiri bersifat dinamis sehingga selalu berusaha memperbaiki dirinya yang secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah pendidikan.

## 2. Konsep *Green Smart Village*

**Tabel 1-2**  
**Perbedaan Konseptual antara *Smart City* dengan *Smart Village***

<b>Aspek</b>	<b>Smart City</b>	<b>Smart Village</b>
Pendekatan	<i>Top- down</i>	<i>Bottom- up</i>
Posisi Pemerintah	<i>Regulator</i>	<i>Fasilitator</i>
Posisi Masyarakat	<i>End- User</i>	<i>Customer</i>
Proses Pengembangan	Kolektivitas dan integrasi elemen dasar smart city	Penguatan, kesadaran, dan partisipasi terhadap elemen smart village
Prioritas Sasaran	Masyarakat dengan mobilitas tinggi	Masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan.
Prasyarat Keberhasilan	Pendekatan teknologi menjadi basis utama dimana setiap pihak didorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar keberhasilan smart city.	Pendekatan sosial – kultural menjadi basis utama. Adanya identifikasi yang valid terhadap berbagai nilai, karakter, norma, dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan <i>smart village</i> .
Tujuan	Terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses informasi, dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.	Terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi.

Sumber : Herdiana, 2019

Perwujudan konsep *green smart village* memiliki dua pemaknaan yang berarti *green village* dan *smart village*. Penyatuan dua konsep ini menjadi sebuah pemecah masalah yang ada di sebagian desa. Makna dari *smart village* berarti :

Pengembangan *smart village* harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “tools” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan atau “goals”. Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator. Dengan begitu, maka sasaran masyarakat yang dituju jelas merupakan kategori masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan, sehingga pengembangan teknologi informasi mampu mendorong kelompok masyarakat tersebut mencapai peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. (Herdiana, 2019 : 5)

Pembangunan desa menggunakan konsep *Green Village* memiliki pengertian yaitu :

Sebuah konsep yang menjaga sebuah kampung atau permukiman untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan perencanaan yang didasarkan pada konservasi lingkungan, energi, pengelolaan sampah, konservasi sumber air, dan sebagainya. Adanya konsep *green-village* ditujukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan prinsip hijau disetiap pembangunannya. Intinya adalah tetap melakukan konservasi hijau atau mempertahankan ruang terbuka hijau, memiliki perilaku ramah lingkungan, pengolahan sampah dan limbah, dan sebagainya. Prinsip *green village* tidak jauh berbeda dengan *eco-village*. (Kadave, Phatak , & Pawar, 2012)

Konsep desain *green village* memiliki beberapa parameter pendukung diantaranya adalah sebagai berikut (Kadave, Phatak , & Pawar, 2012) :

- 1) Ketersediaan sumber air
- 2) Pengolahan sampah dan limbah
- 3) Ketersediaan sumber energi
- 4) Pemanfaatan sampah menjadi produk
- 5) Manajemen pengolahan sampah padat
- 6) Sistem pemanen air hujan (*Rain water harvesting*)
- 7) Sumber energi ramah lingkungan
- 8) Mengurangi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan

Misi perwujudan *green village* untuk mendukung keberlanjutan lingkungan desa.

### **1.5.1.3 Konsep Pembangunan Desa**

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional



dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Subandi (2011 : 9 - 11) mengemukakan bahwa pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Menurut Harun & Ardianto ( 2011 : 3) dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pengertian pembangunan desa telah dijelaskan dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, dimana pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara jelas tujuan pembangunan desa

juga telah dijelaskan didalam pasal 78 ayat (1) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Di dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dijelaskan pula dalam pasal 80 ayat (4) , prioritas, program, dan kegiatan pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, seperti :

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan;
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sasaran umum pembangunan desa menurut Adisasmita (2006 : 23 - 24) adalah pertumbuhan ekonomi perdesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut :

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.
- 2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber – sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- 3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menganggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Terdapat dua hal penting yang menjadi kunci utama mengenai pembangunan desa yaitu desa membangun dan membangun desa. Menurut Eko dkk., (2014 : 39) UU Desa membedakan dengan tegas antara konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun). Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 1-3**  
**Perbedaan Konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”**

<b>Item /Isu</b>	<b>Membangun Desa (Pembangunan Perdesaan)</b>	<b>Desa Membangun (Pembangunan Desa)</b>
Pintu Masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural Development</i>	<i>Local Development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.</i>	Kemandirian, kearifan local, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan local, pemberdayaan, dll.
Level, skala, dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yuridiksi desa.
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi, dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa ( pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan sekaligus membangun kesejahteraan.	1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri.
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai, dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi, dan pengembangan kapasitas desa.
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai, dan melaksanakan.

Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur lintas desa yang lebih baik</li> <li>2. Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota</li> <li>3. Terbangunnya kawasan hutan , <i>collective farming</i>, industri, wisata, dll.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan public bagi warga.</li> <li>2. Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)</li> </ol>
-------	--	--

Sumber : Sutoro Eko

#### A. Membangun Desa

Paradigma membangun desa menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten berperan memiliki kewenangan untuk membantu pemerintahan desa dalam pengembangan desa. Hal ini dilakukan dengan cara menjalankan program –program pengembangan desa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut Eko (2015 : 60) paradigma membangun desa memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Berskala kawasan perdesaan atau lintas desa/desa.
- b) Mempunyai cakupan lebih besar dan strategis daripada pembangunan desa.
- c) Menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
- d) Mengandung sektor-sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air minum, pertanian, kehuatanan, dll).
- e) Perencanaan didasarkan pada potensi yang perlu dikembangkan dan kerentanan yang membutuhkan afirmasi.

- f) Menyediakan ruang-ruang mobilitas sosial ekonomi warga dan masyarakat desa, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- g) Membutuhkan analisis dan pendekatan spasial yang *integrated*, dan didukung dengan model *consolidated budget*.
- h) Membutuhkan pendekatan teknokratis yang canggih
- i) Membutuhkan keseimbangan antara *pro poor, pro growth dan pro jobs*.
- j) Melibatkan partisipasi desa
- k) Responsif pada masalah lingkungan dan sosial.

#### B. Desa Membangun

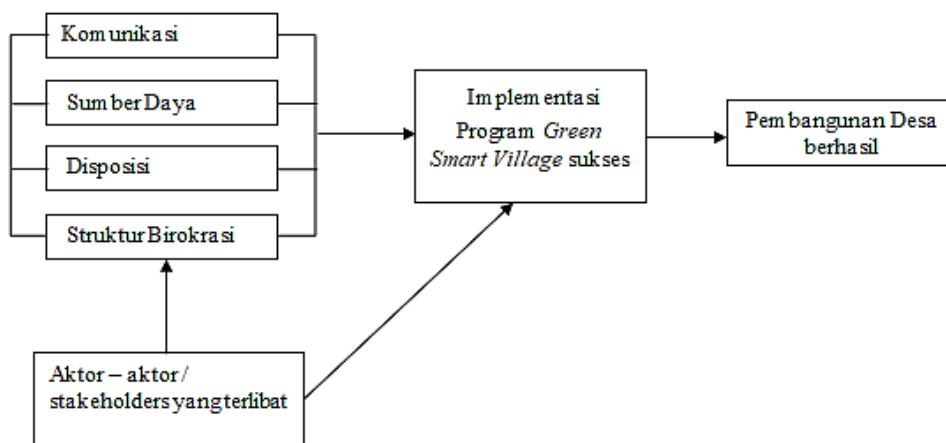
Paradigma desa membangun berbeda dengan paradigma membangun desa. Paradigma desa membangun artinya bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desa. Pengelolaan desa ini dilakukan oleh pemerintah desa bersama – sama dengan masyarakat desa. Pengelolaan desa bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan desa melalui program – program yang dapat meningkatkan perekonomian. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, sehingga desa menentukan sendiri kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Eko (2015 : 56) paradigma Desa Membangun memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Desa mempunyai perencanaan mandiri.
- b) Berdasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang dan sumberdaya lokal.
- c) Berada di desa dan berskala desa.

- d) Berdasarkan pada kewenangan desa, yakni kewenangan asal-usul dan kewenangan nyata yang tumbuh berkembang bersamaan dengan dinamika masyarakat lokal. Kewenangan asal-usul untuk mengelola *communal goods* dan kewenangan nyata untuk mengelola *public goods* (jalan desa, kesehatan, pendidikan, air bersih, dll).
- e) Menjadi kewenangan pemerintah desa dan masyarakat.
- f) Membutuhkan aktor-aktor baik lokal maupun pendamping yang memahami konteks lokal dan mampu membangkitkan kearifan lokal dan gerakan lokal.
- g) Pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu dalam dan detail dalam ranah desa atau menjadi pemain langsung di tingkat desa, melainkan memberikan pengakuan, dukungan, penguatan dan supervisi.
- h) Alokasi dana dari pemerintah masuk ke satu pintu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membiayai perencanaan desa.

### 1.5.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1-2**  
**Alur Kerangka Pemikiran**



Sumber : Analisis penulis

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk membatasi pembahasan di dalam penelitian ini maka menggunakan beberapa konsep dari beberapa teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Sebagaimana yang terumus dalam rumusan masalah, penelitian ini memfokuskan bagaimana implementasi *green smart village* di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali didalam pembangunan desa.

### 1. Konsep implementasi menurut George C. Edwards III

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, ini karena dalam mengkaji implementasi suatu program atau kebijakan perlu mengetahui variabel dan faktor –faktor yang mempengaruhinya.

Variabel yang dimaksud didalam teori implementasi G. Edwards III adalah :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

### 2. Konsep *Green Smart Village*

Konsep *Green Smart Village* mengadopsi dari beberapa komponen konsep *Smart City*, akan tetapi dalam skala yang lebih kecil. Konsep *Green Smart Village* merupakan gabungan dari konsep :

- 1) *Smart Village*
- 2) *Green Village*



Perpaduan konsep *Green Smart Village* dapat di artikan sebagai tata kelola lingkungan desa yang ramah lingkungan yang didukung dengan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang dimaksud adalah teknologi yang baik untuk informasi masyarakat, kegiatan pertanian, serta mendukung kegiatan ekonomi, lingkungan dan sosial.

### 3) Konsep Pembangunan Desa

Dilandasi pada kenyataan bahwa desa juga menjadi tumpuan pembangunan nasional, dan keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional maka posisi desa sungguh sangat penting. Desa perlu dikembangkan secara inovatif menuju desa cerdas atau *smart village*. Pada penelitian ini, konsep pembangunan desa yang dimaksud menggunakan paradigma “Desa Membangun” dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Desa mempunyai perencanaan mandiri.
- 2) Berdasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang dan sumberdaya lokal.
- 3) Berada di desa dan berskala desa.
- 4) Berdasarkan pada kewenangan desa, yakni kewenangan asal-usul dan kewenangan nyata yang tumbuh berkembang bersamaan dengan dinamika masyarakat lokal. Kewenangan asal-usul untuk mengelola *communal goods* dan kewenangan nyata untuk mengelola *public goods* (jalan desa, kesehatan, pendidikan, air bersih, dll).
- 5) Menjadi kewenangan pemerintah desa dan masyarakat.

- 6) Membutuhkan aktor-aktor baik lokal maupun pendamping yang memahami konteks lokal dan mampu membangkitkan kearifan lokal dan gerakan lokal.
- 7) Pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu dalam dan detail dalam ranah desa atau menjadi pemain langsung di tingkat desa, melainkan memberikan pengakuan, dukungan, penguatan dan supervisi.
- 8) Alokasi dana dari pemerintah masuk ke satu pintu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai perencanaan desa.

### **1.7 Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam sebuah penelitian, diperlukan perencanaan yang rapi, pengelolaan yang benar, pengolahan berbagai kebutuhan penelitian dan penggunaan metode yang tepat. Metode penelitian menurut Soebagyo (1997 : 2) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian. Metode penelitian juga dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods* (campuran kualitatif dan kuantitatif). Metode penelitian yang dilakukan penulis meliputi :

### 1.7.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang cocok digunakan adalah tipe penelitian *mixed method*. Penelitian menggunakan mixed metode berarti menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Alasan utama menggunakan tipe penelitian *mixed method* ini karena peneliti ingin mendalami sekaligus mengukur fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan implementasi *Green Smart Village* di Desa Banyuanyar.

Penelitian campuran (*mix method*) menurut Creswell ( 2010 : 5 ) merupakan pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono ( 2014 : 404 ) metode penelitian kombinasi (*mix method*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid reliable*, dan obyektif. Desain penelitian pada penelitian adalah *sequential exploratory* artinya mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari wawancara dengan narasumber secara mendalam, metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konsep *green smart village* dalam upaya pembangunan Desa Banyuanyar. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk melihat pendapat masyarakat terhadap program *green smart village* yang sedang berjalan.

### 1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali dimana desa ini adalah satu-satunya desa yang menerapkan *green smart village* dalam upaya pembangunan desa.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan informan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. Fokus penelitian yang diteliti adalah implementasi *green smart village* dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuanyar, aktor dan peran yang terlibat di dalam implementasi *green smart village*, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi program tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Banyuanyar

Informan yang diteliti adalah Bapak Komarudin selaku Kepala Desa Banyuanyar. Informasi yang diteliti adalah bagaimana implementasi *green smart village* yang ada di Desa Banyuanyar dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu melihat peran dari kepala desa dalam implementasi program tersebut, mengingat kepala desa Banyuanyar adalah aktor yang berinovasi dalam menggunakan *green smart village* di Desa Banyuanyar.

## 2. Perangkat Desa Banyuanyar

Perangkat desa yang diwawancarai adalah Alif Komarudin selaku perangkat desa bagian pelayanan. Informasi yang diteliti terkait dengan implementasi *green smart village* dilihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini karena perangkat desa adalah implementor dari program tersebut.

## 3. Badan Permusyawaratan Desa Banyuanyar

Informan yang diwawancarai adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyuanyar yaitu Bapak Sutadi. Informasi yang diteliti adalah bagaimana peran BPD dalam menjalankan tugasnya menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan variabel teori implementasi Edwards III yaitu komunikasi dalam mencapai keberhasilan *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.

## 4. Gabungan Kelompok Tani Desa Banyuanyar

Informan yang diwawancarai adalah ketua Gapoktan Desa Banyuanyar yaitu Bapak Sumeri. Informasi yang diteliti terkait dengan peran Gapoktan Banyuanyar dalam menjalankan *green smart village* karena Desa Banyuanyar sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak, sehingga pembangunan desa sangat banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian.

## 5. Badan Usaha Milik Desa dan pengelola unit usaha

Informan yang diwawancarai adalah Ketua BUMDes Berkarya Desa Banyuanyar yaitu Danis Andi Pangestu dan pengelola unit usaha pengelolaan kopi yaitu Eko

Budi Suroso. Informasi yang diteliti terkait dengan peran BUMDES dan pengelola unit usaha desa setempat dalam menjalankan *green smart village* karena sebagai motor penggerak ekonomi desa dan sangat mempengaruhi pembangunan desa.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian, yang mampu memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan kuesioner . Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara, foto kegiatan di lapangan, dan kuesioner kepada masyarakat desa. Data primer berupa data yang yang didapatkan dari pemerintah desa terkait dan masyarakat desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan implementasi program *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah

dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Pada penelitian ini, data sekunder berupa dokumen Boyolali dalam Angka Tahun 2018 dan 2019, dokumen RPJM Desa Banyuanyar tahun 2019 – 2025, dokumen masterplan pembangunan Desa Banyuanyar, dokumen Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Masterplan Smart City Boyolali Tahun 2019 – 2023, serta berita online yang terkait dengan *green smart village* di Desa Banyuanyar.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, arsip / dokumen serta kuesioner.

##### **1. Wawancara**

Menurut Moleong (2017 : 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2017 : 186) antara lain :

Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan – kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan –kebulatan demikian sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang ; memverifikasi , mengubah, dan mengubah , dan memperluas informasi yang diperoleh dari oranglain , baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi , mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan desa melalui konsep *green smart village*. Serta menjawab rumusan masalah ketiga yaitu apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan *green smart village*. Informan yang akan diwawancari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

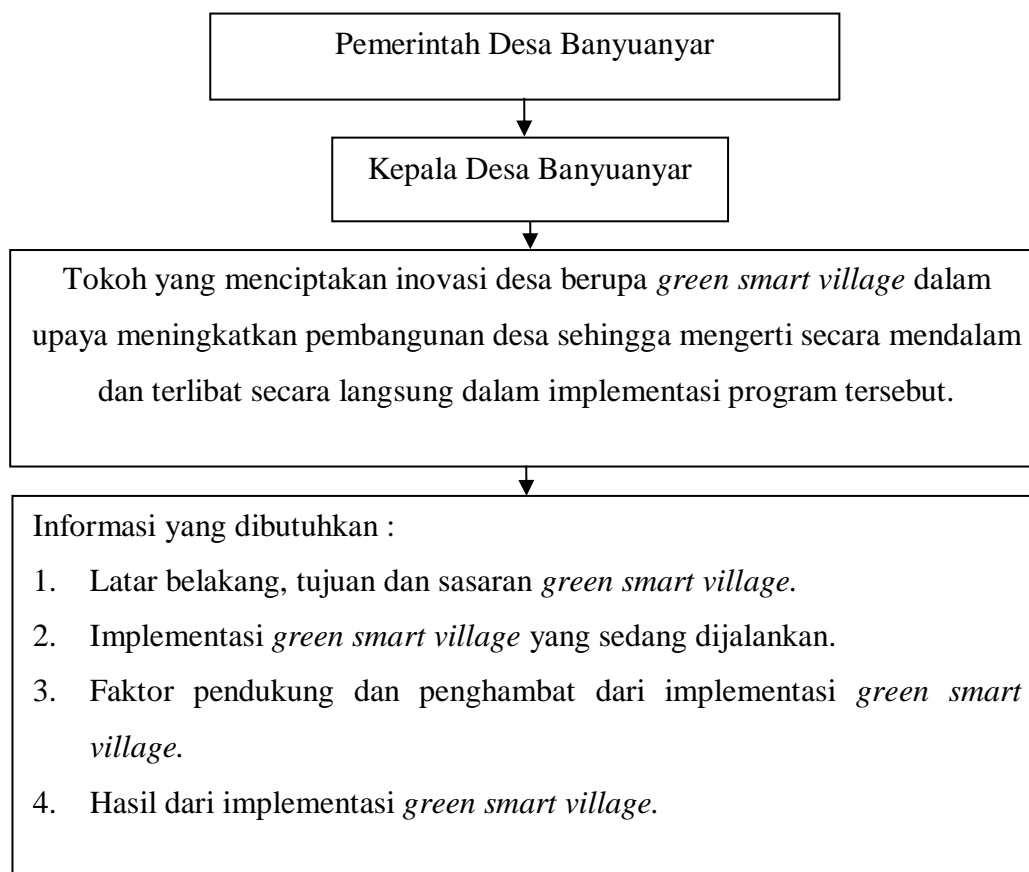
**Tabel 1-4**  
**Kelompok Informan dan Hasil Data yang di Harapkan**

No	Kelompok Informan	Jumlah Orang	Data Yang diharapkan
1	Kepala Desa Banyuanyar	1	Informasi mengenai : 1. Latar belakang, tujuan dan sasaran program tersebut. 2. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program tersebut. 3. Hasil dari implementasi <i>green smart village</i>
2	Perangkat Desa Banyuanyar	1	Informasi mengenai : 1. Pemahaman mengenai <i>green smart village</i> yang sedang dijalankan. 2. Implementasi <i>green smart village</i> yang sedang dijalankan. 3. Hasil dan perbedaan yang dirasakan dari implementasi <i>green smart village</i> terhadap pembangunan desa baik dari infrastruktur desa maupun perekonomian desa.
3	Ketua BPD, Ketua Gapoktan, Ketua BUMDES, salah satu pengelola unit usaha desa.	4	Informasi mengenai : 1. Keterlibatan mereka dalam implementasi program tersebut. 2. Hasil dan perbedaan yang dirasakan dari implementasi <i>green smart village</i> terhadap pembangunan desa baik dari infrastruktur desa maupun perekonomian desa.

Sumber : Penulis

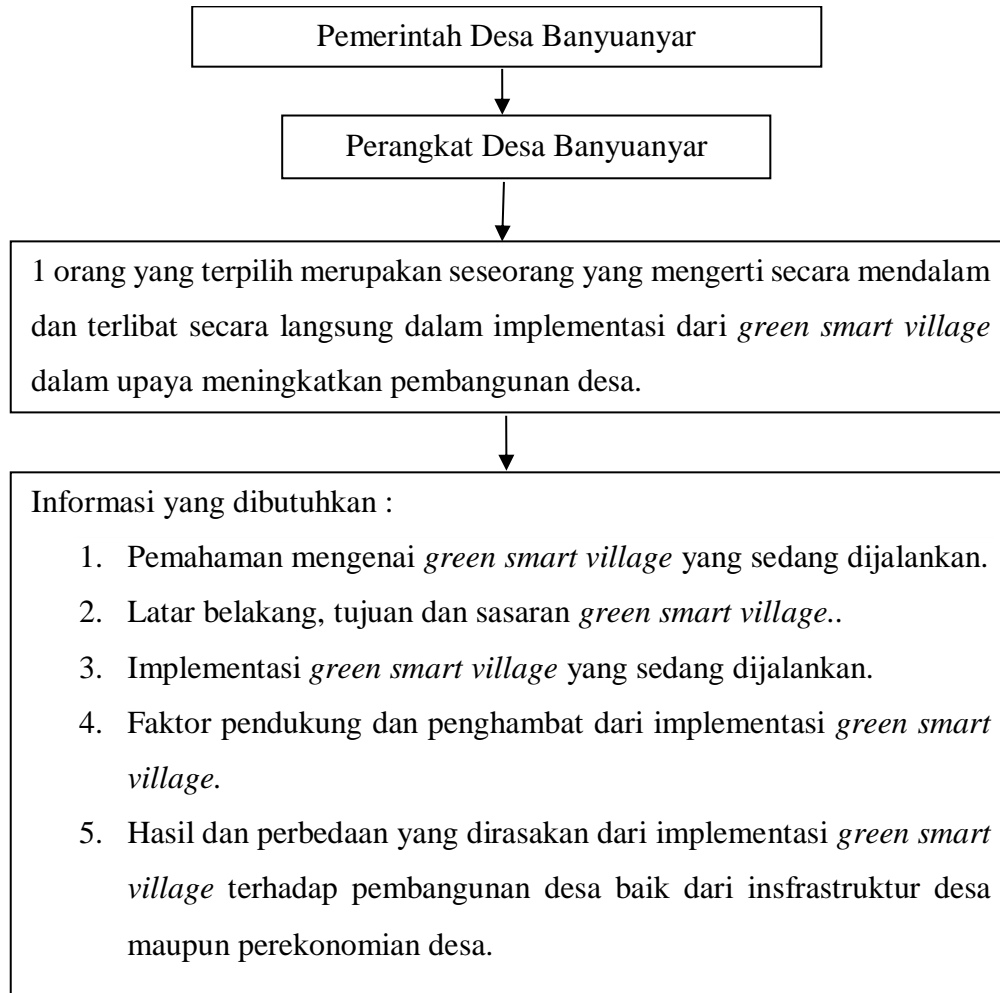


**Gambar 1-3**  
**Daftar Informan dan Data yang Diperoleh di Pemerintah Desa Banyuanyar**



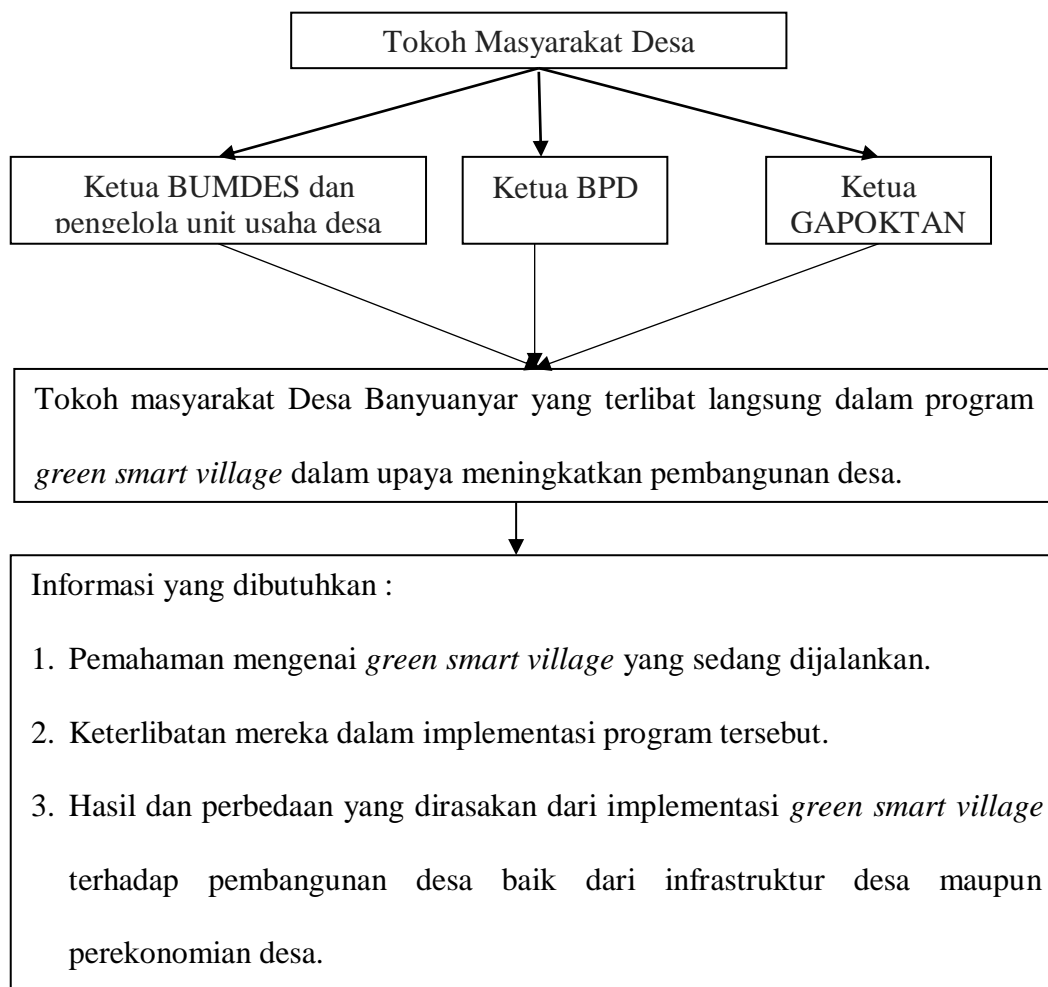
Sumber : Penulis

**Gambar 1-4**  
**Daftar Informan dan Data yang Diperoleh di Pemerintah Desa Banyuanyar**



Sumber : Penulis

**Gambar 1-5**  
**Daftar Informan Tokoh Masyarakat yang Diperoleh dari Desa Banyuanyar**



Sumber : Penulis

## 2. Arsip / Dokumen

Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

Data- data ini didapat Di Kantor Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Pada penelitian ini, data berupa dokumen Boyolali dalam Angka Tahun 2018 dan 2019, dokumen RPJM Desa Banyuanyar tahun 2019 – 2025, dokumen masterplan pembangunan Desa Banyuanyar, dan dokumen Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Masterplan *Smart City* Kabupaten Boyolali.

### 3. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2014 : 142) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penggunaan kuesioner ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu implementasi *green smart village* sesuai dengan teori George Edwards III. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Menurut Sugiyono (2014 : 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan sampel, menurut Sugiyono (2014 : 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi dari penelitian ini berjumlah 2767 jiwa. Penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh masyarakat Desa Banyuanyar dengan menggunakan penghitungan rumus *Frank Lynch* karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif.

Adapun rumus *Frank Lynch* sebagai berikut :

$$n = \frac{Nz^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + z \cdot p(1-p)}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

z = nilai standar sesuai dengan tingkat kepercayaan ( nilai variabel normal)

1. Nilai variabel normal ( 2,58) untuk tingkat kepercayaan 99 %

2. Nilai variabel normal ( 1,96 ) untuk tingkat kepercayaan 95 %

3. Nilai variabel normal ( 1,65 ) untuk tingkat kepercayaan 90 %

d = error yaitu tingkat kesalahan yang ditentukan

1. 0,01 untuk z = 2,58

2. 0,05 untuk z = 1,96

3. 0,10 untuk z = 1.65

p = proporsi atau presentasi yang mempunyai karakteristik tertentu ( Harga patokan tertinggi)

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 2767 jiwa, untuk tingkat kepercayaan sebesar 90% sehingga d = 0,10 , p = 0,50 dan z = 1,65. Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{Nz^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + z \cdot p(1-p)}$$

$$n = \frac{2767 (1,65)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)}{2767 (0,10)^2 + (1,65)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)}$$

$$n = \frac{1.883,289375}{27,67 + 0,680625}$$

$$n = 66,4$$

Hasil disesuaikan oleh peneliti menjadi 68 responden.

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan sebanyak 68 orang. Sampel yang diambil berdasarkan teknik *probability sampling* ; *purposive stratified random sampling*, Menurut Eriyanto (2007 : 99) pengambilan sampel dengan metode *purposive stratified random sampling* dilakukan dengan cara sebelum sampel diambil dari populasi dilakukan stratifikasi populasi terlebih dahulu berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel yang diambil disesuaikan dengan proporsi populasi sehingga lebih mencerminkan populasi tersebut. Pada penelitian ini diambil strata berdasarkan jumlah dukuh serta membagi proporsi jumlah laki-laki dan perempuan dengan perbandingan masing-masing 50 %. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

**Tabel 1-5**  
**Jumlah Responden Tiap Dukuh dengan Teknik *Stratified Random Sampling***

<b>Dukuh</b>	<b>Jumlah Masyarakat</b>	<b>Perhitungan Responden tiap Dukuh</b>	<b>Jumlah Responden tiap Dukuh</b>	<b>Pembagian Laki-Laki dan Perempuan</b>
Banyuwanyar	397	$\frac{397}{2767} \times 68 = 9,75$	10 responden	5 laki – laki 5 responden
Geneng	303	$\frac{303}{2767} \times 68 = 7,44$	7 responden	4 laki – laki 3 perempuan
Rekuning	194	$\frac{194}{2767} \times 68 = 4,76$	5 responden	3 laki-laki 2 perempuan
Grenjeng	246	$\frac{246}{2767} \times 68 = 6,04$	6 responden	3 laki-laki 3 perempuan
Bunder	174	$\frac{174}{2767} \times 68 = 4,27$	4 responden	2 laki-laki 2 perempuan
Ngemplak	166	$\frac{166}{2767} \times 68 = 4,07$	4 responden	2 laki- laki 2 perempuan
Dukuh	440	$\frac{440}{2767} \times 68 = 10,81$	11 responden	6 laki-laki 5 perempuan
Wangan	529	$\frac{529}{2767} \times 68 = 13,00$	13 reponden	6 laki –laki 7 perempuan
Jembleng	314	$\frac{314}{2767} \times 68 = 7,71$	8 responden	4 laki-laki 4 perempuan
<b>JUMLAH</b>	<b>2767</b>	<b>68</b>	<b>68 responden</b>	<b>34 laki-laki 34 perempuan</b>

Sumber : Penulis

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan model skala likert. Menurut Sugiyono (2014 : 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Untuk mengukur variabel diatas digunakan skala likert lima tingkat beserta skor tiap poin jawaban sebagai berikut :

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1) Sangat Setuju (SS)        | = 5 |
| 2) Setuju (S)                | = 4 |
| 3) Netral (N)                | = 3 |
| 4) Tidak Setuju (TS)         | = 2 |
| 5) Sangat Tidak Setuju (STS) | = 1 |

#### **1.7.6 Analisis dan Intepretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014 : 206) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan



data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman MP3, menyebar kuesioner, dan catatan lapangan yang dilakukan penulis selama berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis yang akan menyeleksi, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, hasil kuesioner, dan catatan lapangan, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk tertulis, peneliti membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar data dapat diperoleh lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampai disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan datadata yang telah ada. Untuk kuesioner, data diolah menggunakan SPSS untuk kemudian disajikan dalam bentuk

tabel hasil pendapat masyarakat. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan triangulasi yakni check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Apakah sumber data yang satu sesuai dengan data yang lainnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.

## 2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasi, dan check and recheck antara satu sumber data dengan sumber yang lainnya. Sajian data dapat meliputi deskriptif, matriks dan table. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan mudah memahami dan mengerti.

## 3. Penyimpulan Data

Dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara, kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

### **1.7.7 Kualitas Data**

Pada penelitian ini , pengujian kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Hal ini karena instrumen utama penelitian kualitatif adalah manusia. Menurut Sugiyono (2014 : 83) bahwa dalam teknik pengumpulan data dengan triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Secara tidak langsung kredibilitas data yang didapatkan dari pengumpulan data dan sumber data lainnya. Pada penelitian ini dimana menggunakan teknik triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan metode, menurut Patton ( 1987 : 329 ) artinya triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu informasi yang sama, misalnya observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.